

Kepemilikan hak atas tanah yang tidak didukung sertipikat Badan Pertanahan Nasional : studi kasus Putusan PN Balikpapan nomor : 42/Pdt.G./1994/PN.Bpp jo Putusan PT Samarinda nomor : 114/Perd/1995/PT.KT.Smda jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3015 K/Pdt/1996 jo. Putusan Mahkamah Agung Register Nomor : 592 PK/Pdt/2001 = Land ownership without certificate from National Land Agency : case study of land dispute at Taman Bekapai in Balikpapan, Decision of Balikpapan District Court No. 42/Pdt.G./1994/PN.Bpp juncto Decision of Balikpapan High Court No. 114/Perd/1995/PT.KT.Smda jo. Supreme Court Decision No. 3015 K/Pdt/1996 jo. Supreme Court Decision No. 592 PK/Pdt/2001

Felix Sanjaya Hartady, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20349023&lokasi=lokal>

Abstrak

Pendaftaran Tanah bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pemiliknya. Namun kenyataannya, masih banyak masyarakat yang belum mendaftarkan tanah kepemilikannya, seperti yang terjadi pada kasus ini yaitu Tuan Abdul Rasyid cs melakukan gugatan perdata setelah mengetahui tanah yang dimilikinya telah dikuasai oleh Pemerintah Kota Balikpapan, gugatan tersebut dimenangkan oleh Abdul Rasyid cs pada tingkat Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, dan Peninjauan Kembali meskipun Abdul Rasyid cs tidak memiliki alat bukti kepemilikan apapun.

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melihat kenyataan yang telah terjadi dan kemudian meninjau dari aspek hukumnya yang dituangkan ke dalam suatu bentuk tulisan deskriptif, yang menggambarkan permasalahan dan membahas dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Negara memberikan perlindungan hukum kepada semua pemilik tanah baik yang memiliki sertipikat ataupun tidak. Namun tentunya dengan kadar yang berbeda, dimana pemilik sertipikat dianggap yang paling benar selama tidak ada yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, sedangkan pemilik tanah nonsertipikat mendapatkan perlindungan untuk menguasai tanah yang ditempati dan ruang untuk mendaftarkan tanahnya dalam kondisi apapun, tentunya dengan dilengkapi data-data yang dapat menunjangnya seperti riwayat tanah, surat keterangan tanah tidak bersertipikat, girik, dll. Selanjutnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi secara cermat telah memberikan putusan yang tepat dengan berlandaskan pada kebenaran materiil yang ada. Namun, sungguh disayangkan hingga tahun 2013, objek tanah sengketa belum dieksekusi.

.....

Land registration aims to give legal certainty and protection for the land owner. However, in practice, a lot of people has not registered their land ownership. This is reflected upon a case of Abdul Rasyid et al. in which he filed a civil law suit after he was aware that his land had been appropriated by Local Government of Balikpapan. Abdul Rasyid won his case at High Court, Supreme Court and subsequently during judicial review at Supreme Court even though Abdul Rasyid et al. did not possess any evidentiary title whatsoever. The method use in this thesis is a legal normative method that is to observe factual occurrences and to

subsequently analyse such factual occurrences from legal perspective in explanatory writing. Such writing is to observe issues and to expound such issue from prevailing regulations.

Result (of this thesis) shows that the State does not grant any protection whatsoever to land owner who does not hold land certificate. However, the State gives room for its citizens to register their lands in whatever conditions based on Government Regulation No 24 of 1997 concerning Land Registration. Furthermore, members of the High Court has been very meticulous in rendering its accurate decision based on existing material facts. However, it is very disappointing that until 2013 the land in dispute has not been executed.